

Buletin

Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



**BUKA KERAN SPA, DONGKRAK
PERDAGANGAN MULTILATERAL**

PENGALAMAN PERTAMA
BISNIS FOREX YANG TERUS
MEMBEKAS

CUKUP SEMENTARA
MENJADI NOMOR 2

DARI LANTAI 4 KAMI
SUPPORT SEMUA
UNIT BAPPEBTI

EDISI 194

PENANGANAN PENGADUAN & PROSES PENEGAKAN HUKUM (UU 32/1997 & PP 10/1999)

PERKA 125



PERKA 11 - 13



DAFTAR ISI

PASAR LELANG

Pasca Lelang GKR, UKM Lebih Mudah Peroleh Gula Rafinasi

10

PERDAGANGAN BERJANGKA

Menimbang Mata Uang Virtual

12

AGENDA FOTO

14

AKTUALITA

18

- Negara Produsen Minyak Sawit Lawan Kebijakan Parlemen Eropa
- Waspada! Pelemahan Ekonomi China
- Harga minyak Naik, Tapi Tertekan Tambahan Produksi AS
- Harga Emas Masih Melaju Hingga Akhir Pekan
- Ditopang Komoditas, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Diprediksi Meningkat
- Produksi Kopi Indonesia Turun, Menurut BPS karena Faktor Cuaca
- Penyandang Dana SRG di Babel Diusulkan Dari Bank Syariah
- SPPT-SPA Cegah Penipuan Transaksi Nasabah

ENGLISH CORNER

22

INFO HARGA

25

KOLOM

26

KOMIKITA

30

BERITA UTAMA

Buka Keran SPA, Dongkrak Perdagangan Multilateral



4

DARI LAPANGAN

Dari Lantai 4 Kami Support Semua Unit Bappebti



24

KIPRAH

Pengalaman Pertama Bisnis Forex Yang Terus Membekas



28

Buletin
Bappebti
Mengabdikan Dengan Integritas

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Nusa Eka

Penyunting / Editor
Diah Sandita Arisanti
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer
Fitriana Hasnan
Leli Wulandari

Sekretaris
Yudi Ahmad Wahyudi

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

www.bappebti.go.id

f Bappebti Kementerian Perdagangan
t @InfoBappebti
ig @Bappebti



BUKA KERAN SPA, DONGKRAK PERDAGANGAN MULTILATERAL

Moratorium izin SPA dilakukan karena beberapa alasan, antara lain adanya sejumlah pengaduan dari nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi SPA. Bappebti sempat dimintai keterangan oleh DPR. Meski demikian, transaksi SPA masih diizinkan dan tetap berjalan sambil Bappebti melakukan perbaikan sistem pengawasannya. Moratorium tersebut semestinya berlaku hingga tahun 2019, namun pada awal tahun 2018 Bappebti memutuskan mencabutnya sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No 55/BAPPEBTI/SE/02/2018.

Mengawali tahun 2018 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti] membuat gebrakan untuk mendorong laju perkembangan perdagangan berjangka. Langkah yang dilakukan yaitu dengan membuka kembali keran perizinan bagi Sistem Perdagangan Alternatif [SPA]. Sebelumnya, sejak 2014 Bappebti melakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin baru bagi SPA. Moratorium mencakup perizinan persetujuan sebagai peserta dan penyelenggara SPA, serta persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka peserta SPA.

Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral, dengan penarikan margin yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke lembaga kliring berjangka. Produk SPA yaitu kontrak *foreign exchange* [forex] atau valuta asing [valas], stock index seperti Nikkei, Hangseng, DJIA, dan emas loco London [LLG].

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Pantas Lumban Batu menjelaskan, latar belakang moratorium pada waktu itu adalah adanya sejumlah pengaduan dari nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi SPA. "Kami sempat dimintai keterangan oleh DPR," ungkapnya. Kata Pantas Lumban, DPR menyarankan agar tidak dikeluarkan izin dulu kalau masih banyak kasus yang merugikan nasabah. Selanjutnya sistem pengawasannya perlu diperbaiki.

Untuk itulah Bappebti kemudian memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin baru bagi perusahaan SPA. Meskipun demikian transaksi SPA masih diizinkan dan tetap berjalan, sementara Bappebti berusaha melakukan perbaikan sistem pengawasannya. Moratorium tersebut



mestinya berlaku hingga tahun 2019, namun pada awal tahun 2018 Bappebti memutuskan mencabut ketentuan penghentian sementara itu. Pencabutan moratorium itu tertuang dalam Surat Edaran No 55/BAPPEBTI/SE/02/2018. Dalam Surat Edaran yang dirilis tanggal 8 Februari 2018 itu disebutkan alasan pencabutan ketentuan moratorium atau pembatasan izin SPA yaitu bahwa saat ini Bappebti sudah memiliki sistem pengawasan yang efektif terhadap kegiatan perdagangan berjangka SPA yaitu Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi SPA [SPTT-SPA].

Sebagaimana dijelaskan Kepala Bappebti Bachrul Chairi, pembukaan kembali perizinan SPA dikarenakan saat ini sudah ada sistem pengawasan yang disebut Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif [SPTT-SPA]. Melalui SPTT-SPA yang diluncurkan pada bulan Oktober 2017 Bappebti bisa melakukan pengawasan langsung secara *online* terhadap proses perdagangan berjangka bilateral atau SPA. "Pengawasan melalui SPTT-SPA sangat efektif, cepat dan akurat," ungkap Bachrul kepada sejumlah media di Jakarta.

Sistem pengawasan tunggal transaksi tersebut menjamin transparansi seluruh proses kegiatan perdagangan SPA, sehingga

**DENGAN PENCABUTAN
MORATORIUM DISERTAI
SISTEM PENGAWASAN YANG
BAIK DIHARAPKAN SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF BISA
MAKIN BERKEMBANG DAN LEBIH
TERTIB, TERATUR, EFEKTIF,
EFISIEN DAN TRANSPARAN**

bisa dicegah atau diminimalisasi kemungkinan terjadinya kecurangan yang bisa merugikan nasabah. SPTT-SPA bisa meningkatkan akuntabilitas kerja karena adanya ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan mutakhir. Lebih jauh, dalam jangka panjang sistem ini mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Biaya-biaya seperti untuk input data dan penyimpanan data terkait pelaporan dan pengawasan transaksi bisa ditekan.

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Pantas Lumban Batu, menjelaskan, dulu pengawasan dilakukan oleh bursa dan lembaga kliring seperti BBJ [Bursa Berjangka Jakarta] dan BKDI [Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia]. Mereka mengirim hasil pengawasan ke Bappebti. "Sekarang dengan sistem *online*, Bappebti bisa langsung *capture* data-data dari pedagang," ujarnya.

Dikemukakan Pantas Lumban, sejak dilakukan moratorium pada tahun 2014 jumlah kasus-kasus terkait praktik SPA berkurang. Artinya, moratorium itu cukup efektif menurunkan praktik-praktik curang dalam transaksi SPA yang merugikan masyarakat. "Kini kita anggap mereka sudah baik, mulai patuh, dan sistem pengawasannya sudah kita siapkan. Jadi, moratorium perizinan dicabut," tegasnya. Ditambahkan Pantas Lumban, pemberian izin baru SPA akan dilakukan secara bertahap,

dengan mempertahankan jumlah perusahaan seperti sebelum dilakukan moratorium. Perlu diketahui, bahwa setelah dilakukan moratorium tahun 2014 jumlah perusahaan SPA agak berkurang.

“Dulu sekitar dua ratusan termasuk kantor cabang, lalu berkurang karena ada yang dicabut dan mengundurkan diri. Sekarang setelah moratorium dicabut, perusahaan SPA kembali bisa mengajukan izin, tentu dengan persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Selain sistem pengawasan secara online oleh Bappebti, bagi nasabah sekarang sudah ada piranti yang memungkinkan mereka untuk melihat data dan transaksi yang dilakukan secara transparan. Sistem yang dibangun oleh Kliring Berjangka Indonesia [KBI] dinamakan Sitna atau Sistem Informasi Transaksi Nasabah. Sitna merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai transaksi berjangka yang telah dijamin ke PT KBI [Persero]. “Hari ini berapa transaksi saya, itu bisa dilihat sekarang. Ini dibangun Kliring Berjangka Indonesia,” ungkap Pantas Lumban. Sedangkan PT Indonesia Clearing House [ICH] bersama BKDI [Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia] atau ICDX [Indonesia Commodity and Derivatives Exchange] memiliki sistem yang disebut Citra [Clearing Info of Trade] yang menyediakan informasi proses kliring bagi nasabah.

Perdagangan Multilateral

Pantas Lumban Batu menyatakan, dengan adanya sistem pengawasan transaksi tunggal yang dibangun Bappebti dan sistem informasi bagi nasabah yang dikembangkan KBI maupun ICH, nasabah bisa merasa lebih nyaman dan aman dalam bertransaksi di perdagangan berjangka bilateral atau SPA. Dengan pencabutan moratorium disertai sistem pengawasan yang baik diharapkan Sistem Perdagangan Alternatif bisa makin berkembang



dan lebih teratur, efektif, efisien dan transparan. Dijelaskan Pantas, selama pemberlakuan moratorium perdagangan SPA atau bilateral tetap tumbuh, namun kecenderungannya menurun. Selama tahun 2014-2015 transaksi SPA tumbuh 5,27 persen, kemudian turun menjadi 4,81 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017, pertumbuhannya turun drastis yaitu hanya 2,67 persen. Sedangkan perdagangan berjangka multilateral masih mencatat pertumbuhan yang cukup baik, meskipun prosentasenya juga turun. Pada tahun 2014-2015 perdagangan multilateral tumbuh 15,47 persen, kemudian menjadi 12,97 persen pada tahun 2016, namun menurun pada tahun 2017 menjadi -7,93 persen.

Pantas Lumban Batu mengungkapkan, sebenarnya yang

lebih diharapkan tumbuh besar adalah perdagangan multilateral. Pertumbuhan perdagangan berjangka multilateral dinilai penting untuk pembentukan harga, sehingga harga produk komoditi Indonesia bisa jadi referensi atau acuan harga internasional. “Harga kopi misalnya, selama ini ditentukan oleh London. Harga CPO ditentukan oleh Malaysia, padahal kita penghasil CPO terbesar di dunia,” jelas Pantas.

Sejauh ini, secara nilai atau volume transaksi perdagangan berjangka masih didominasi transaksi bilateral atau SPA yang mencapai sekitar 85 persen, sedangkan transaksi multilateral hanya sekitar 15 persen. Pada tahun 2017 misalnya, total kontrak multilateral mencapai 1,332 juta lot. Sedangkan total kontrak bilateral [SPA] mencapai 5,713 juta lot.

Masalahnya, bagaimana mendongkrak perdagangan berjangka multilateral? Dengan kondisi transaksi SPA masih dominan saat ini, apakah pencabutan moratorium perizinan SPA tidak semakin membuat perdagangan multilateral tertinggal jauh dibanding SPA? Pantas Lumban berpendapat bahwa peningkatan transaksi bilateral [SPA] akan mendorong pula peningkatan transaksi multilateral. “Bukan transaksi SPA meningkat, lalu multilateral turun. Nggak. Harapan kita, ini [SPA] justru mendorong yang multi,” ujarnya.

Namun menurut Pantas, untuk meningkatkan perdagangan multilateral memang perlu ada upaya-upaya khusus. Yang pertama, harus ada penambahan baik komoditi maupun jenis kontraknya.

Komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka saat ini relatif masih sedikit yaitu kopi, CPO, olein, kakao, timah dan emas. Produk atau komoditinya perlu ditambah agar mampu menarik lebih banyak investor. Demikian pula jenis kontraknya harus lebih banyak atau variatif. “Untuk komoditi kopi misalnya, sekarang ini hanya ada Robusta dan Arabica, bisa saja ditambah *Robusta Grade One, Robusta Grade Two*. Jadi, di samping jenis komoditi, juga variasi kontraknya perlu ditambah,” ungkap Pantas Lumban.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya untuk mendorong pertumbuhan perdagangan berjangka multilateral yaitu perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat. Pantas Lumban menilai, selama ini masyarakat tampak lebih suka melakukan perdagangan bilateral atau SPA dibanding multilateral. “Itu bukan karena ada keuntungan khusus di sana [SPA], melainkan karena mereka lebih terbiasa dengan transaksi SPA. Jadi ini masalah *habit*,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, perlu ada literasi tentang perdagangan berjangka multilateral. Ini tugas berbagai pihak, bursa, pialang, dan Bappebti. Media, menurut Pantas, juga bisa berperan memberikan edukasi, sosialisasi, kepada publik.

Bursa Berjangka Jakarta

Sementara itu, Bursa Berjangka Jakarta [BBJ] menargetkan peningkatan *volume* transaksi perdagangan berjangka pada tahun 2018 sebesar 10 persen, baik perdagangan bilateral maupun multilateral. Pada acara “Sosialisasi Awal tahun 2018 Bursa Berjangka” di Jakarta, Direktur Utama BBJ Stephanus Paulus Lumintang menyatakan optimismenya untuk mencapai target tersebut. Untuk itu BBJ akan merevitalisasi kontrak perdagangan berjangka. Dalam

kaitan itu, pada tahun 2018 BBJ merencanakan meluncurkan tiga kontrak baru yaitu gula kristal rafinasi, kontrak karet berjangka dan *gold* syariah. “Sebenarnya dengan tiga kontrak baru di tahun 2018, kami berharap ada peningkatan 30 persen, meskipun targetnya hanya 10 persen,” ujar Paulus seperti dilansir media *online* Jawapos.com [25/1/2018].

Diungkapkan Paulus Lumintang, BBJ juga akan memacu peningkatan transaksi olein yaitu minyak goreng hasil penyulingan minyak kelapa sawit mentah. Dalam dua tahun terakhir *volume* perdagangan berjangka olein meningkat cukup besar. Pada tahun 2016 perdagangan Olein 10 mencapai 78 ribu lot, kemudian naik menjadi 107 ribu lot pada tahun 2017 atau meningkat 37 persen. Secara total, perdagangan Olein 10 dan Olein 20 naik sekitar 3 persen dari tahun ke tahun [*year to year*] dari total transaksi perdagangan multilateral.

Peningkatan ini tentu menumbuhkan optimisme terhadap prospek perdagangan olein di tahun 2018 ini. Paulus menyatakan, target dari peningkatan perdagangan olein yaitu menjadikan harga olein Indonesia sebagai acuan harga dunia. Pernyataan Paulus Lumintang ini seperti mengamini harapan Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Pantas Lumban Batu. Indonesia sebagai produsen olein terbesar di dunia sudah selayaknya menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam penentuan harga. Bukan hanya olein, tapi juga produk-produk lain seperti kopi. Dengan produksi yang tinggi, harga kopi Indonesia mestinya juga menjadi referensi bagi dunia internasional. Untuk mewujudkan itu, tentu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah, Bappebti, Bursa, pialang dan masyarakat. Semoga.



**SURAT EDARAN
NOMOR 55/BAPPEBTI/SE/02/2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PEMBATAAN PERIZINAN DALAM
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka, meningkatkan efektifitas pengawasan Bappebti kepada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Perdagangan Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Bappebti telah membangun Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif [SPTT-SPA] yang memungkinkan Bappebti melakukan pengawasan secara efektif terhadap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu mencabut pembatasan perizinan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka melalui Sistem Perdagangan Alternatif secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Pencabutan Pembatasan perizinan di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang mencakup persetujuan sebagai Peserta Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

5. Isi Edaran

Dengan adanya Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif [SPTT-SPA] yang memungkinkan Bappebti melakukan pengawasan secara efektif terhadap transaksi Sistem Perdagangan Alternatif maka:

- Bappebti mencabut Surat Edaran Kepada Bappebti Nomor 51/BAPPEBTI/SE/03/2017 tentang Perpanjangan Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif; dan
- Bappebti dapat menerbitkan perizinan baru di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang mencakup:
 - persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 - persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, secara bertahap dan terbatas.

6. Penutup

Surat Edaran Kepala Badan ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan. Demikian Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2018**

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

ttd,

BACHRUL CHAIRI

Untuk informasi lebih lanjut bisa di akses:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_bappebti/edaran_kepala_bappebti_2018_02_01_4qk0narg_id.pdf



Pasca Lelang GKR, UKM Lebih Mudah Peroleh Gula Rafinasi

Pasar lelang gula kristal rafinasi [GKR] menunjukkan tren yang positif. Selain penyerapan gula melalui pasar lelang yang terus meningkat, harga GKR juga bergerak menuju titik keseimbangan

Sejak Bappebti menggelar uji coba lelang gula kristal rafinasi [GKR] harapan agar Usaha Kecil dan Menengah [UKM] bisa lebih mudah mendapatkan gula rafinasi mulai tampak. Kepala Bappebti Bachrul Chairi menyatakan hingga Februari 2018 peserta yang berpartisipasi dalam lelang GKR didominasi

oleh Usaha Kecil Menengah [UKM] makanan dan minuman, Industri Kecil Menengah [IKM, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [UMKM] yang memang menjadi sasaran utama dilaksanakannya lelang GKR. Tercatat peserta beli sebanyak 1.965 pelaku usaha, terdiri atas 451 industri besar/IKM dan 1.514 Koperasi/UKM/UMKM. Sedangkan jumlah peserta jual tercatat sebanyak 11 perusahaan.

Bachrul melihat uji coba lelang GKR mulai menunjukkan dampak yang positif. "Volume gula per bulan yang diperdagangkan di pasar lelang GKR terus meningkat jumlahnya. Selain itu, harga yang terbentuk di pasar lelang GKR juga menunjukkan tren penurunan, menuju titik keseimbangan," ujar Bachrul Chairi.

Berdasarkan catatan Bappebti antara September 2017-Februari 2018 pasar lelang GKR mencatatkan

volume transaksi sebesar 4.989 ton. Volume transaksi per bulannya pun menunjukkan tren peningkatan, mulai dari 70 ton pada September 2017 menjadi 245 ton pada Oktober 2017, 611 ton pada November 2017, 929 ton pada Desember 2017, 1.763 ton pada Januari 2018 dan 1.371 ton pada Februari 2018.

Sementara kisaran harga GKR di pasar lelang per bulannya adalah Rp9.525/kg pada September 2017, Rp9.163/kg pada Oktober 2017, Rp9.107/kg pada November 2017, Rp8.967/kg pada Desember 2017, Rp8.910/kg pada Januari 2018, dan Rp8.879/kg pada Februari 2018.

Sejak masa uji coba lelang GKR dimulai pada September 2017, Bappebti masih menantikan bergabungnya perusahaan-perusahaan besar ke dalam pasar lelang GKR. Dengan bergabungnya ke

pasar lelang GKR, menurut Bachrul Chairi, semua pelaku usaha dapat bersama-sama menciptakan iklim usaha yang transparan dan neraca gula nasional yang kredibel. "Pemerintah masih perlu dukungan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontrak jangka panjang dengan industri GKR. Informasi seperti izin industri, nama perusahaan, kapasitas gudang, dan alamat pengiriman pembeli akan sangat bermanfaat bagi tata niaga GKR," ungkap Bachrul.

Ditambahkan dalam masa uji coba yang masih terus berlangsung hingga saat ini, Bappebti menemukan indikasi bahwa kebutuhan industri terhadap GKR lebih kecil dari jumlah GKR yang dialokasikan. Ini berarti terdapat kelebihan pasokan GKR dibandingkan dengan kebutuhannya, sehingga dikhawatirkan ini bisa memunculkan risiko kebocoran. "Dari hasil pendataan kontrak yang sedang dalam proses lelang, Bappebti menemukan indikasi bahwa alokasi GKR melebihi kebutuhan. Hal tersebut dilihat dari permohonan persetujuan impor, yang salah satunya berdasarkan kontrak dan kapasitas produksi antara penjual

dan pembeli," kata Bachrul.

Selain itu, terdapat kontrak yang dibuat saat ini untuk periode pengiriman khusus di kuartal tertentu dalam rentang tahun 2019-2021. Kontrak ini dijadikan sebagai dasar permohonan izin impor sehingga terdapat penggelembungan volume GKR secara kontrak, padahal tidak direalisasikan di tahun penerbitan perizinan impor [PI]. "Realisasi kontrak banyak yang kedaluwarsa, sehingga terdapat sisa kontrak dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan pembeli lebih kecil dibanding volume dalam kontraknya, sehingga ada kemungkinan GKR dijual ke pihak lain," tambah Bachrul lagi.

Selain itu, ada kontrak yang memiliki klausul apabila pembeli hanya merealisasikan sebagian dari kontrak, maka penjual tidak mengenakan sanksi kepada pembeli. Sehingga, ada potensi kelebihan impor bahan baku yang tidak digunakan untuk memenuhi kontrak. Informasi lainnya adalah banyak kontrak yang sudah kedaluwarsa dan tidak dilakukan perpanjangan, akan tetapi kontrak itu



tetap berlaku. Dampaknya, pada saat realisasi pengiriman barang sudah tidak memiliki dasar hukum.

Alasan lain yang mengindikasikan adanya alokasi GKR berlebih di pasar adalah perusahaan pembeli keberatan memberikan dokumen perizinan, meskipun untuk itu mereka menjadi terbebani biaya lelang. "Adanya potensi pembeli yang bekerja sama dengan penjual untuk menggelembungkan volume kontrak. Apabila data perizinannya diketahui, maka akan dapat dideteksi pembeli mana yang membuat kontrak tidak sesuai dengan kebutuhannya," kata Kepala Bappebti menegaskan.

Dengan berlakunya Pasar Lelang GKR diharapkan akan terwujud transparansi dalam jual beli gula kristal rafinasi. Dengan demikian regulator dapat lebih mudah melihat pemenuhan wajib pajak para peserta lelang, khususnya terkait PPN dan PPh badan. "Pembeli yang membeli GKR di atas kebutuhan produksi dengan maksud untuk dirembeskan, akan dengan mudah terbaca gerakannya," kata Bachrul.



Menimbang Mata Uang Virtual

Isu tentang mata uang virtual makin sering terdengar di masyarakat. Muncul pro-kontra, tapi pemerintah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati karena mata uang jenis ini sangat berisiko.

Perbincangan tentang mata uang virtual [virtual currency] di Indonesia belakangan ini cukup marak. Hal ini karena peredaran mata uang digital tersebut yang terus meluas dan merambah berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sejauh ini memang masih terjadi perdebatan pro dan kontra terkait penggunaan mata uang virtual sebagai sarana transaksi. Pemerintah beberapa

negara melarang keras penggunaan mata uang digital karena dinilai bisa mengganggu stabilitas keuangan negara. Pemerintah Indonesia juga tidak mengizinkan penggunaan uang virtual untuk alat pembayaran. Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. "Bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah," tegasnya.

Bitcoin adalah mata uang virtual paling populer dan peredarannya cukup luas. Selain Bitcoin ada berbagai jenis mata uang virtual lain diantaranya Blackcoin, Dash, Dogcoin, Litecoin, Ethereum, dan masih banyak lagi. Bank Indonesia mencatat, saat ini ada sekitar 1.490 mata uang virtual di seluruh dunia.

Sikap Bank Indonesia yang melarang penggunaan virtual currency untuk kegiatan transaksi pembayaran didukung Kementerian Keuangan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan

Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, mengatakan selain tidak memiliki landasan hukum penggunaan mata uang virtual untuk alat pembayaran mengandung risiko tinggi. Dijelaskan Nufransa, karena tidak ada otoritas yang mengatur dan mengawasi, mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, sarana pencucian uang [money laundering], dan pendanaan terorisme. Hal ini membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuk [Kontan.co.id, 22 Januari 2018].

Transaksi mata uang virtual yang bersifat spekulatif berisiko terjadinya penggelembungan nilai [bubble]. Nilai mata uang virtual naik-turun tidak mudah diprediksi. Bitcoin misalnya, pernah pada akhir tahun 2017 mencapai nilai sekitar 270 juta rupiah, tetapi beberapa hari kemudian turun hingga menjadi 177 juta rupiah. Pernah dalam satu jam nilai Bitcoin turun 1.000 dollar AS atau sekitar 13,3 juta

rupiah [Kompas.com, 26 Januari 2018].

Mata uang virtual juga rawan serangan siber. Salah satu pusat perdagangan Bitcoin di Korea Selatan bangkrut karena serangan siber.

Komoditi Perdagangan Berjangka

Meski masih mengundang kontroversi, minat orang untuk mencoba menggunakan mata uang virtual semakin tinggi. Kecenderungan belakangan ini yaitu menjadikan mata uang virtual sebagai sarana investasi. Di sejumlah negara mata uang virtual telah masuk perdagangan berjangka. Pada awal Desember 2017 telah diluncurkan sebuah bursa perdagangan berjangka terbesar di AS yaitu Bitcoin Futures Exchange.

Di Indonesia juga mulai ada wacana

Direktur Commodity Futures Research and Institute, Iwan Cahyo, mendukung kemungkinan memasukkan mata uang virtual sebagai komoditas perdagangan berjangka. Menurutnya, yang penting harus ada regulasi untuk pembuatan kontraknya. Cahyo menilai, Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang virtual sebagai sarana transaksi pembayaran, bukan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing, juga berpendapat bahwa perdagangan aset virtual di Indonesia harus diatur, terutama perizinan dan pengawasannya. "Bitcoin atau jenis lainnya bisa masuk menjadi komoditas bursa berjangka. Tetapi bukan pada

sudah diingatkan risikonya," tegas Menteri Keuangan.

Perlu Kajian Mendalam

Teknologi informasi digital terus berkembang, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Fenomena mata uang virtual merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi digital. Kehadiran mata uang virtual tidak terhindarkan. Tentu, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi di luar. Namun, tentu juga tidak boleh bersikap terburu-buru, sekadar mengikuti kecenderungan yang berkembang di dunia. Perlu ada pertimbangan menyeluruh terhadap berbagai aspek, terutama terkait



memasukkan mata uang virtual sebagai komoditas pasar berjangka. Dalam acara Market Review 2017 dan Outlook 2018 PT Bursa Berjangka Jakarta, 10 Januari 2018, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, mengungkapkan ada peluang bagi mata uang virtual masuk ke perdagangan berjangka. Saat ini Bappebti bersama beberapa lembaga terkait sedang melakukan kajian-kajian tentang peluang tersebut.

Bursa Efek, karena Bitcoin bukan masuk jenis sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal," ungkap Tongam.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sikap pemerintah yang melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi dan sistem pembayaran. Tetapi, sebagai alat investasi, keputusan diserahkan pada masyarakat. "Sebagai pemerintah kami terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi, itu keputusan pada masyarakat. Tapi

kepentingan masyarakat dan negara.

Dibutuhkan kajian mendalam terhadap fenomena mata uang virtual, sisi positif negatifnya, plus minusnya. Berdasar kajian yang mendalam dari berbagai aspek dan sudut pandang, perlu dibentuk regulasinya yang jelas dan tegas, sehingga bisa menjadi pedoman bagi semua pihak, masyarakat, untuk mengambil keputusan terbaik.

Pelantikan Pengurus ASPEBTINDO 2018-2021



Kepala Bappebti Bachrul Chairi melantik Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Aspebtindo [Asosiasi Perdagang Berjangka Komoditi Indonesia] terpilih periode 2018-2021, Rabu [14/2], di Jakarta. Ketua umum yang baru terpilih kembali F. Wishnubroto yang sebelumnya juga menduduki posisi yang sama, dengan sekretaris Jacob Ongkowidjojo dan Bendahara Joni Rizal. Sementara Dewan Pengawas terpilih, yakni Tris Sudarto, Ardiansyah Parman dan Hasan Zein Mahmud. Kepengurusan dibantu oleh beberapa orang wakil ketua.

Pertemuan Kelompok Kerja SRG



Praktek pembiayaan terhadap barang yang disimpan (*inventory financing*) memang bukan hal baru di Indonesia, namun Sistem Resi Gudang [SRG] memperluas akses pembiayaan yang semula hanya melibatkan 3 pihak dalam suatu perjanjian kerjasama [*Collateral Management Agreement*] menjadi bersifat umum dan lebih luas. Penegasan ini disampaikan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi didampingi Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Retno Rukmawati, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan M Syist dalam acara Pertemuan Kelompok Kerja Sistem Resi Gudang [SRG]. Acara yang mengambil tema "Optimalisasi Pembiayaan Melalui Sistem Resi Gudang" ini berlangsung di Jakarta [15/2]. Hadir dalam kesempatan ini anggota Pokja SRG [BI, OJK, Bank BRI, BJB, Perum Jamkrindo, PT BGR, PT Pos] dan instansi terkait lainnya.

Diskusi Umum PBK, SRG, Dan PLK

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditi harus bersinergi dalam menghadapi era perdagangan digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini disampaikan menteri saat membuka diskusi umum Outlook PBK, SRG, dan PLK 2018 dengan pemangku kepentingan di Jakarta, Rabu [7/2]. Selain diskusi umum, Menteri Perdagangan juga meresmikan Sistem Pengawasan Transaksi Tunggal Sistem Perdagangan Alternatif [SPTT-SPA] untuk kegiatan perdagangan berjangka Indonesia.



Pembekalan INTEGRITAS kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kemendag



Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Srie Agustina memberikan pembekalan kepada 62 orang Calon Aparatur Sipil Negara [CASN] Kemendag terkait integritas, di Jakarta, Kamis [15/2]. Pembekalan dimaksudkan agar CASN tidak hanya memiliki kapabilitas untuk bisa mencapai kinerja yang tinggi, namun juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan komitmen yang kuat serta loyalitas dan menjaga nama baik Kemendag.

Bimbingan Teknis Pasar Lelang Komoditi



Bappebti menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pasar Lelang Komoditi yang diselenggarakan di Bali, 20-23 Februari 2018. Dalam pembukaan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, menyampaikan saat ini peran teknologi dan informasi sudah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam sektor perdagangan. Melihat semakin pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan besarnya potensi bisnis yang dapat diperoleh dari kegiatan *e-commerce*, maka Bappebti telah membangun Sistem Pasar Lelang Terpadu yang memungkinkan transaksi komoditas dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Rakor Perdagangan Berjangka Di Banjarmasin



Sebanyak 50 peserta dari Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, Perguruan Tinggi dan lembaga terkait lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan hadir dalam Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Berjangka di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis [22/2].

Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi [Rakor] ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, terutama karena saat ini sedang marak adanya tindakan melawan hukum yang berkedok Perdagangan Berjangka [atau Kegiatan Perdagangan Berjangka secara ilegal].

Mendag Menerima Kunjungan Penasihat Gubernur Sverdlovsk, Rusia



Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, menerima kunjungan Penasihat Gubernur Sverdlovsk, Rusia, Vyacheslav Potekhin di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis [22/2]. Pertemuan ini membahas rencana partisipasi Indonesia dalam World Expo 2025, dimana Kota Ekaterinburg, Rusia akan menjadi salah satu kandidat tempat penyelenggaraan pameran tersebut pada tahun 2025 mendatang. Pada kesempatan ini Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Bimtek Penyuluh Lapangan SRG



Selama empat hari mulai Senin [26/2] hingga Kamis [1/3] Bappebti menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan Sistem Resi Gudang [SRG] di Jakarta. Saat membuka acara Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, mengungkapkan bahwa tenaga penyuluh pertanian lapangan merupakan ujung tombak program sosialisasi program pertanian yang akan sangat efektif dalam ikut mensosialisasikan SRG kepada para petani. Sebab merekalah yang secara langsung dan intensif berhadapan dengan para petani secara individu maupun berkelompok, khususnya di daerah-daerah lokasi kerjanya.

Bimbingan Teknis ini dilakukan untuk menyiapkan SDM [sumberdaya manusia] Penyuluh Lapangan yang mempunyai pengetahuan tentang SRG secara menyeluruh, mampu memberikan pemahaman tentang SRG dan mendampingi para petani/kelompok tani maupun koperasi dan UKM.



Negara Produsen Minyak Sawit Lawan Kebijakan Parlemen Eropa

bersama didengar dan didukung oleh UE, sehingga ke depan usulan tersebut ditolak sebagai sebuah *directive* dan tidak merugikan kepentingan nasional kita,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel, Dupito D. Simamora, dalam keterangan tertulis kepada pers, Sabtu [17/2].

Indonesia juga telah menyampaikan pernyataan sikap tegas melalui beberapa pendekatan yang dilakukan melalui surat Menlu RI kepada para Menlu negara-negara UE, serta melakukan pendekatan ke berbagai pihak di Jakarta maupun di Brussel.

KBRI Brussel pun terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses *trialogue*. Upaya ini bertujuan agar usulan parlemen tidak dilaksanakan, karena tidak sejalan dengan perdagangan yang bebas dan adil. Usulan Uni Eropa itui pun dianggap tidak adil karena larangan penggunaan minyak sawit dalam *biofuel* lebih cepat dibandingkan *rapeseed* dan *soybean* yang akan dilarang pada 2030. Dalam surat tersebut juga disertakan permintaan, agar negara produsen sawit dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.



Waspada Pelemahan Ekonomi China

Deutchse Bank dalam risetnya memperkirakan ekonomi China akan melambat ke level 6,3% pada tahun 2018. Perkiraan ini didasarkan pada dua asumsi. Pertama, kebijakan fiskal dan moneter pada semester I akan diperketat. Kedua, investasi akan melanjutkan tren penurunan seiring dengan langkah kebijakan pengetatan dan kondisi finansial.

Karena itulah saat ini Pemerintah China tidak lagi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi secara kuantitas. Sebaliknya, China akan lebih fokus untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Meski pertumbuhan belanja modal diperkirakan lebih rendah dari tahun lalu, tapi di saat yang sama konsumsi diperkirakan tetap tumbuh ditopang oleh tren kenaikan upah buruh di China.

Dorongan konsumsi yang masih kuat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan impor China tahun ini hingga 10%,

melampaui pertumbuhan ekspor pada tahun yang sama yang diperkirakan 7%. Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, memprediksi pada tahun ini ekonomi China cenderung stabil. Hal itu karena Negeri Tirai Bambu itu kini tengah melakukan berbagai upaya restrukturisasi ekonomi.

Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, berharap Indonesia mencermati arah kebijakan ekonomi China. Sebab, katanya, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi China akan mendorong kenaikan ekonomi Indonesia 0,1%. “Sebagian besar ekspor dan impor kita berjalan dengan China,” ujar Bhima Yudistira, Kamis [15/2].

Indonesia juga perlu mewaspada pengetatan moneter China, imbas dari pengetatan moneter Amerika Serikat. “Ini akan berimplikasi pada suku bunga di Indonesia terdorong naik,” tutur Bhima.

Harga minyak Naik, Tapi Tertekan Tambahan Produksi AS

Harga minyak kembali mencatat kenaikan mingguan setelah turun tajam sepekan sebelumnya. Pada hari Jumat [16/2] harga minyak untuk pengiriman Maret 2018 di New York Mercantile Exchange naik 0,55% ke US\$ 61,68 per barel dalam sehari. Ini adalah kenaikan harian ketiga bagi harga minyak. Dalam sepekan, harga minyak menguat 4,19% dari US\$ 59,20 per barel pada akhir pekan lalu.

Harga minyak brent pengiriman April 2018 yang diperdagangkan di ICE Futures naik 0,79% ke US\$ 64,84 per barel. Kenaikan harga minyak acuan ini sekitar 3,26% dalam sepekan. Meski menguat, harga minyak belum mampu menutup penurunan 8% pada pekan sebelumnya. “Harga minyak mendapat dukungan pasar saham global dan pelemahan dolar. Tapi potensi naik terbatas karena proyeksi kenaikan produksi minyak Amerika Serikat [AS],” kata Tomomichi Akuta, ekonom senior dari Mitsubishi UFJ Research and Consulting di Tokyo.



Indeks *dollar* yang mencerminkan nilai tukar *dollar* AS terhadap mata uang utama dunia pada Kamis [15/2] ditutup naik ke 89,10. Indeks *dollar* ini naik 0,57% dari posisi terendah sejak 17 Desember 2014.

Menteri energi Uni Emirat Arab mengatakan, OPEC dan Rusia berniat menyusun kesepakatan jangka panjang hingga tahun ini. OPEC dan produsen non OPEC masih mengurangi produksi hingga 1,8 juta barel per hari untuk menopang harga. Kesepakatan ini akan berakhir 2018.

Di sisi lain, AS justru mengerek produksi hingga 10,27 juta barel per hari pada pekan lalu. Angka keluaran Energy Information Administration ini menunjukkan bahwa produksi minyak AS sudah lebih tinggi ketimbang Arab Saudi. Diperkirakan kenaikan pasokan minyak AS ini dan likuidasi posisi jangka panjang akan terus menekan harga minyak.

Harga Emas Masih Melaju Hingga Akhir Pekan

Perkembangan harga komoditi pada pertengahan Februari 2018, tidak hanya pasar saham dan minyak yang mencatat kenaikan mingguan. Hingga Jum'at [16/2] harga emas pun masih terus melaju. Harga emas untuk pengiriman April 2018 di Commodity Exchange naik tipis 0,07% ke US\$ 1.356,2 per ons troy. Dalam sepekan, harga emas masih menguat 3,08% dari penutupan akhir pekan lalu.

Pada perdagangan intraday, harga emas sempat tembus US\$ 1.360 per ons troy. Tapi karena penguatan nilai tukar *dollar* Amerika Serikat [AS], kekuatan harga emas sedikit pudar. “Kami melihat dolar AS akan tetap melemah. Inilah kunci kenaikan harga emas selanjutnya,” ujar Daniel Smith, Director of Commodity Service Oxford Economics sebagaimana dikutip Reuters.

Indeks dolar berada di posisi 89,10, pada Jumat [16/2]. Indeks ini naik tipis dari posisi terendah sejak 17 Desember 2014 yang tercapai hari sebelumnya. Pasar

finansial memperkirakan, pemerintah AS mungkin akan menerapkan strategi pelemahan dolar ketika pengetatan moneter secara global mulai tampak. Namun demikian harga emas masih berpotensi turun. Pasar fisik emas di Asia melemah. Permintaan emas di China, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam turun. Emas fisik di India bahkan turun harga untuk pertama kalinya dalam tiga pekan.

“Kenaikan harga emas terutama disebabkan oleh pelemahan dolar Amerika Serikat [AS] dan pembelian emas fisik menjelang Tahun Baru Imlek,” kata Amit Kumar Gupta, Portfolio Management Services Head Adroit Financial Services kepada Reuters. Gupta menambahkan, pasar mulai menimbang efek inflasi AS yang lebih tinggi. Jika inflasi makin tinggi, pamor emas bisa ikut naik.

Gupta menambahkan, titik tertinggi harga di bulan Januari adalah US\$ 1.365 dan tertinggi pada tahun 2016 di angka US\$ 1.375 per ons troy. “Jika harga emas melewati kedua level ini, maka ruang kenaikan akan makin luas,” katanya.

Ditopang Komoditas, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Diprediksi Meningkat

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bakal meningkat pada tahun 2018 sejalan dengan kenaikan harga komoditi dunia. "Peningkatan pertumbuhan ekonomi global bersumber dari perbaikan ekonomi negara maju dan negara berkembang yang lebih kuat dari perkiraan semula," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (15/2).

Agus menjelaskan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ditopang investasi dan konsumsi yang menguat seiring optimisme terhadap reformasi pajak. Eropa juga diprediksi tumbuh lebih baik, karena didukung perbaikan ekspor dan konsumsi serta kebijakan moneter yang akomodatif. Pertumbuhan ekonomi Jepang juga direvisi ke atas sejalan dengan perkembangan ekspor yang kuat, implementasi insentif perpajakan untuk perusahaan, dan kebijakan moneter yang masih akomodatif. "Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi



China diperkirakan tetap tumbuh tinggi terutama didorong oleh ekspor seiring peningkatan permintaan, khususnya dari negara maju," jelas Agus. Dan ekonomi India pun diproyeksikan mulai pulih seiring hilangnya dampak demonetisasi dan penerapan sistem pajak baru.

"Prospek pemulihan ekonomi global yang membaik tersebut akan meningkatkan volume perdagangan dunia dan harga komoditi global, termasuk minyak, pada 2018," ujar Agus. Namun ia juga menambahkan adanya sejumlah risiko yang patut diwaspadai yang berdampak pada stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Risiko tersebut adalah dari sisi eksternal, yakni peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global terkait kenaikan ekspektasi suku bunga acuan AS dan harga minyak dunia. Dari sisi domestik, risiko yang diwaspadai antara lain konsolidasi korporasi yang terus berlanjut dan intermediasi perbankan yang belum kuat.

Produksi Kopi Indonesia Turun, Menurut BPS karena Faktor Cuaca

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan hingga awal tahun 2018 akan terjadi penurunan produksi kopi di Indonesia. Penurunan tersebut disebabkan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, mengungkapkan penurunan produksi kopi tersebut kemungkinan besar merupakan penyebab turunnya nilai tukar petani di sektor perkebunan.

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia memperkuat pernyataan tersebut dan mengungkapkan bahwa produksi kopi Indonesia akan turun ke level



terendah dalam 7 tahun. Kondisi ini disebabkan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.

Sebelumnya dikabarkan ekspor kopi Vietnam bakal melonjak pada tahun ini, sejalan dengan panen raya yang membuat produksinya meningkat karena cuaca yang baik di negeri itu. Mengutip Bloomberg, Rabu (14/2), Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Tran Tuan Anh, menyatakan total ekspor kopi Vietnam diprediksi mencapai 1,55 juta metrik ton pada tahun 2018.

Penyandang Dana SRG di Babel Diusulkan Dari Bank Syariah

Minat petani di Bangka Belitung untuk menaruh komoditi lada yang mereka hasilkan ke gudang SRG [Sistem Resi Gudang] masih tergolong rendah. "Hingga saat ini di gudang SRG ada 4,9 ton lada. Idealnya, untuk memperkuat posisi tawar lada kita itu, satu butir lada pun harus masuk ke gudang SRG," ujar Ketua Dewan Rempah Wilayah Bangka Belitung [Babel], Bayodandari, dalam Seminar "SRG Komoditi Lada" di Universitas Bangka Belitung, Selasa (20/02).

Bayodandari menjelaskan bahwa SRG sangat penting bagi perbaikan nasib petani dan karenanya SRG terus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya petani lada. Ia kemudian menjelaskan dasar hukum SRG termaktub dalam UU No 9 Tahun 2006 tentang SRG yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2011. Di dalam peraturan itu disebutkan bahwa penyandang dana SRG adalah bank konvensional. Namun karena petani di Babel terkenal sebagai masyarakat yang religius, maka bank yang digunakan adalah bank syariah.



"Kita inginkan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Memang belum diatur Bappebti [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi]. Tapi akan kita jelaskan ke Bappebti," ujar Bayodandari.

Operasional SRG lada di Babel ditandai dengan pergudangan perdana lada di Desa Puding Besar pada 22 Nopember 2017 lalu. Gudang SRG ini dikelola bersama oleh PT Bhanda Ghara Reksa [BGR] dan Pemprov Babel. "Pengelolaan gudang dalam sistem SRG ini nantinya diserahkan kepada koperasi. Tapi bila koperasi belum siap, maka kita usulkan kembali dikelola oleh PT BGR. Idealnya di setiap kecamatan di Babel ada satu gudang SRG," ujar Bayodandari.



SPPT-SPA Cegah Penipuan Transaksi Nasabah

Komoditi [Bappebti] untuk mendeteksi secara dini adanya penipuan keuangan industri perdagangan berjangka dan derivatif di Indonesia. SPTT-SPA akan digunakan Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan pengawasan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). "SPTT-SPA dibuat agar tidak ada pihak yang dapat memanipulasi transaksi nasabah," kata Mendag.

Pemanfaatan SPTT-SPA didasarkan pada perkembangan transaksi perdagangan berjangka yang masih didominasi transaksi SPA. Pada tahun 2017 misalnya, transaksi perdagangan berjangka mencapai 7,04 juta lot, terdiri dari transaksi SPA sebesar 5,71 juta lot [81,09 persen] dan transaksi multilateral sebesar 1,33 juta lot [18,91 persen]. Menteri Perdagangan berharap dengan adanya SPTT-SPA ini dapat menciptakan integritas dalam perdagangan berjangka.

Glossary

Coincident Indicator

An economic indicator that reflect changes in the economy. The index of industrial production and retail sales are both coincident indicators.

Collar

A contract between a borrower and a lender whereby the borrow will not have to pay more than some maximum interest rate on the borrowed funds, and whereby the lender is assured of receiving some maximum interest on the fund lent.

Collateral

A general term used in the market for the value of any borrowed fund.

Combination

Puts and calls held either long or short with different strike prices and expirations.

Commercial

An entity involved in the production, processing, or merchandising of a commodity.

Commercial Grain Stocks

Domestic grain in store in public and private elevation at important markets and grain afloat in vessels or barges in harbors of lakes and seaboard ports.

Commercial Paper

Short-term promissory notes issued in bearer form by large corporations, with maturities ranging from 5 to 270 days. Since the notes are unsecured, large corporations with impeccable credit ratings generally dominate the commercial paper market.

Commission

The charge made by a commission house for buying and selling commodities.

Commission Fee

A fee charged by a broker for executing a transaction. Also referred to as brokerage fee.

Commitment

A trade is said to have a "commitment" when he assumes the obligation to accept or make a delivery on a futures contract.

Digital Rupiah Study to be Completed in 2020

Bank Indonesia head of transformation, Onny Widjanarko, said that a study on the possible issuance of digital rupiah by the central bank was projected to be completed in 2020. He said the central bank was still in the early stages of its research. "We have yet to plan a pilot project or trial," said Onny in Jakarta, Wednesday [14/2], adding that the bank was looking into the legal implications of issuing the digital currency. Law No.7/2011 on currency only recognizes the rupiah issued in the form of a banknote or coin. "We are studying the implications on the monetary and

financial system. Everything is still in the research [process]," he added.

BI was looking to other countries, such as Singapore and Canada, which had begun pilot projects on digital currency. Canada started its digital currency research in March 2016 by launching Project Jasper, while Singapore began Project Ubin in November 2016.

BI Governor, Agus Martowardojo, said previously that using bitcoin as a payment and transaction instrument contravened the law, which designates the rupiah as the only official transaction and payment instrument in the country.

Indonesia Takes Initiative To Respond EU Stand on Palm Oil

Indonesia has coordinated a joint action by palm oil producing countries in Southeast Asia, Central America, South America and Africa against European Union's call for stopping the use of palm oil for biofuel. The Indonesian embassy in Brussels in its statement said that Indonesia has coordinated the joint action and step needed by palm oil producing countries against the call put in a EU report.

Ambassadors from the palm oil producing countries agreed to send letters to the European Parliament, the European Commission, the European Council and other stakeholders in the EU on February 15 with regard to their complaint.

They hoped with the letter EU institutions would accept their stance including that of Indonesia. "By involving all palm oil producing countries, Indonesia wished to assure that its

position as well as their concerns would be heard by the EU so that in the future the EU proposal would be rejected as a directive and would not hurt us," said Dupito D. Simamora, ad Interim Charge d'Affairs of the Indonesian Embassy in Brussels.

To meet the process the Indonesian embassy in Brussels has continued and will continue to push other palm oil producing countries to fight it so that the proposal will not be implemented as it also runs counter to the principle of a just and free trade.

The Indonesian embassy in Brussels expressed appreciation to all palm oil producing countries for the joint letter they signed ahead of the dialogue. "Indonesia hoped the views and stance of the palm oil producing countries would be seriously taken into consideration by the EU," he said.

Indonesia Exports Shallots and Maize

Indonesia is now able to export shallots to six countries. Agriculture Minister, Andi Amran Sulaiman, said Indonesia imported shallots up to 72 thousand tons [per annum], now it is exporting some 6,400 tons of the commodity. "Shallot is one of the agricultural commodities Indonesia is developing because Indonesia has always imported red onions in the past," Amran said after the inauguration of the executive board leaders of the Indonesian Farmers Association [HKTI] in Banjarmasin, Saturday [10/2]

The shallots were among others exported to Thailand and Sri Lanka. Besides shallot farmers are also now able to export maize, and the export will continue to be carried out periodically. "In the past, we imported 3.6



million tons, now we are exporting the commodity," Amran added. Farmers in Gorontalo Province are to export their maize products to various countries, including Philippines.



Indonesia Relaxes Import Regulations for 6 Commodities

North Sulawesi has enjoyed a high demand for its coconut flour in the Italian market, said Head of the Province's Industry and Commerce Department, Jenny Karouw, stated in Manado, Monday [19/2]. "In February, export volume of North Sulawesi's coconut flour stands at 25 tons and contributes US\$53,750 to the province's export revenue," she noted.

North Sulawesi's coconut flour products exported to Italy are of high quality, she remarked, adding that in the past, the country had only sought nutmeg products, such as nutmeg and nutmeg flowers.

Coconut flour is a product obtained from coconuts and is processed in a way to become the main ingredient for making cakes, breads, and other

items. "Importers choose North Sulawesi's coconut flour due to its good quality. Hence, the quality needs to be maintained or enhanced," she emphasized.

In order to expand the province's export markets, the North Sulawesi governor has also urged local exporters to eye potential markets, such as the United States and countries in Europe, Asia, and Africa, Karouw stated. The governor expects export commodities not only to be limited to coconut products but also to coconut flour and its processed products to gain greater added value.

Besides Italy, North Sulawesi's coconut flour is also exported to Germany, Russia, China, the United Kingdom, the Netherlands, New Zealand, Egypt, Slovenia, Brazil, Australia, Belgium, Uruguay, the United States, and Korea.

Dari Lantai 4 Kami *Support* Semua Unit Bappebti

Saya merasa puas jika kegiatan saya memberikan hasil yang baik dalam arti pengguna anggaran dapat memanfaatkan dana yang di programkan sesuai target kegiatan yang ditetapkan. Kadang saya merasa sangat sedih kalau anggaran yang kita usulkan tidak sesuai dengan realisasi yang diharapkan



Subagiyo
Kepala Bagian Program,
Anggaran dan Pelaporan Bappebti

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Kita masih ingat ketika kita kuliah dulu, apa yang dimaksud dengan POAC [Planning, Organizing, Actuating dan Controlling] yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam manajemen, baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun dilingkungan perusahaan. Di Bappebti perencanaan ini ada dalam dukungan manajemen di Sekretariat Bappebti, tepatnya pada Bagian Program, Anggaran, dan Pelaporan.

Ruangan saya yang berada dipojok belakang lantai 4 terasa nyaman ketika saya berada di antara teman-teman yang sangat membantu dalam setiap melakukan kegiatan tugas saya sehari hari di kantor. Di dinding saya sengaja memajang skema siklus perencanaan dan penganggaran selama satu tahun sejak awal hingga akhir tahun, dan menjadi panduan saya dan teman-teman dalam melakukan aktifitas kegiatan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi pelaksanaannya. Di situ juga terdapat *timeline* yang harus dicermati agar perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Agar kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang dicapai Bappebti, semua kegiatan yang akan dilaksanakan harus terukur mulai dari penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi dan harus tertuang dalam kontrak kinerja yang sudah disepakati pimpinan Bappebti.

Bagian kami membantu tugas tugas Sekretaris Bappebti dalam kaitan dalam hal perencanaan dana penganggaran dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK], Sistem Resi Gudang [SRG], dan Pasar Lelang Komoditas [PLK], sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2011 tentang PBK, UU No. 9 Tahun 2011 di Bidang SRG dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Tugas kami adalah *men-support* seluruh kegiatan perencanaan yang ada di Bappebti, dari sejak tahap persiapan yakni penyusunan program dan anggaran di awal tahun hingga diterbitkannya Daftar Isian Program Anggaran [DIPA] dan Rencana Kegiatan Anggaran [RKA] Bappebti di Akhir Tahun hingga evaluasi kegiatannya.

Siklus Perencanaan dan Penganggaran di pemerintahan ini prosesnya cukup panjang dan berlangsung sepanjang tahun secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan tahapan perencanaan program kerja dan anggaran pemerintah harus melalui birokrasi berjenjang, dimulai dari pembahasan secara internal di Unit Kerja dilanjutkan pembahasan di tingkat kementerian hingga muncul rencana kerja Kementerian Perdagangan.

Rencana Kerja inilah yang nantinya akan dibawa untuk dibahas di Multilateral Meeting [Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Kemen PAN RB]. Hasil dari multilateral meeting ini yang akan menentukan *baseline* penyusunan anggaran. Fase perencanaan tidak berhenti sampai disini, bagian kami harus mengawal proses penyusunan anggaran mulai dari *review* APIP, penelaahan di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sampai dengan proses pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan pengesahan PAGU Indikatif Anggaran Tahun berikutnya. Pagu inilah yang akan menjadi anggaran untuk pelaksanaan program kerja yang mendukung pencapaian target kinerja BAPPEBTI.

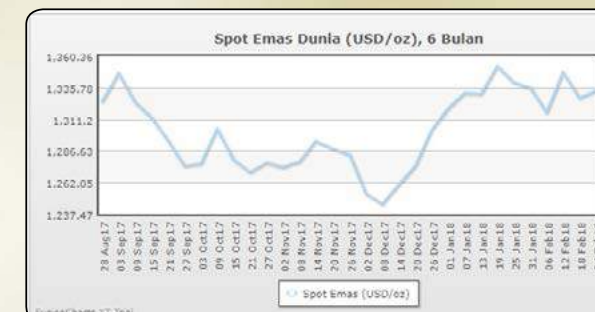
Pekerjaan tersebut kami lakukan sepanjang tahun secara terus menerus, jika suatu kegiatan perencanaan selesai, maka kita sudah harus siap pula untuk menyongsong kegiatan berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga proses perencanaan yang kemudian diikuti tahap pelaksanaan kegiatan berlangsung secara sambung menyambung. Pekerjaan ini saya lakukan dengan sungguh-sungguh agar nantinya bisa memperoleh hasil yang optimal. Dan saya merasa puas jika kegiatan yang saya lakukan memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk unit pengguna dan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kadang saya merasa sangat sedih kalau anggaran yang kita usulkan ternyata realisasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain, hal itu tersebut akan berpengaruh pada semakin menurunnya anggaran tahun berikutnya, saya merasa apa yang saya lakukan belum dapat memenuhi harapan semua pihak.



http://infoharga.bappebti.go.id/harga_komoditi_petani



Harga kopi di tingkat petani di daerah penghasil kopi utama di Lampung menunjukkan tren yang menurun. Produksi kopi menurut perkiraan Badan Pusat Statistik [BPS] diperkirakan juga menurun akibat pengaruh cuaca dimana musim hujan turun lebih panjang. Turunnya harga kopi ini dipengaruhi oleh tekanan dari kopi Vietnam yang tahun ini hasilnya bagus karena dukungan cuaca yang baik. Jika melihat grafik harga di tingkat petani di Lampung, sepanjang bulan Februari 2018 rata-rata harga kopi sekitar Rp24.500/kg.



<http://harga-emas.org/grafik/>



Harga komoditi emas menunjukkan kecenderungan yang bagus. Harga emas PT Aneka Tambang yang menjadi acuan harga emas nasional tampak terus membaik. Demikian juga dengan tren harga emas dunia. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh nilai tukar dolar yang melemah. Pada bulan Februari 2018 kenaikan harga emas ini juga karena adanya perayaan Imlek. Harga emas berada pada kisaran Rp587.000/gram.



Oleh :
Sayadi
Wartawan Pemerhati
Masalah Komoditi

Cukup Sementara Menjadi Nomor 2

Menjadi nomor 2 saja sudah membanggakan bagi Indonesia sebagai penghasil kopi utama dunia. Tapi untuk melangkahkan kaki dari posisi ke-4 melompat ke-2 juga bukan perkara mudah.

Presiden adalah orang nomor 1 di sebuah negara. Menjadi juara 1 adalah cita-cita dari seorang atlet yang berlaga. Hampir semua orang di dunia ini mendambakan menjadi nomor 1. Tapi mengapa tidak menjadi nomor 2 saja? Dalam soal komoditi kopi, Indonesia ingin menjadi eksportir kopi nomor 2 di dunia. Itulah yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Pengembangan Kopi Nasional 2 tahun lalu di Lampung. Meski sudah berlalu dua tahun, tapi harapan Wapres tersebut terasa tetap aktual, karena sampai sekarang memang posisi Indonesia masih belum bergerak banyak.

Produksi kopi di Indonesia

mencapai 660 juta kg biji kopi dengan produktivitas 700 - 900 kilogram/ha kopi per tahunnya. Dibandingkan dengan tetangga dekat kita, Vietnam misalnya, kita tertinggal jauh. Vietnam mampu menghasilkan kopi 1,65 miliar kg biji kopi setahun dengan produktivitas kebun kopi sekitar 1,2 juta ton/ha per tahun. Sementara produksi Brasil di ranking pertama dengan 2,6 miliar kg biji kopi per tahun. Kolombia pada posisi ke-3 dengan produksi 810 juta kg kopi dan di posisi ke-5 ada Etiopia dengan produksi kopi 384 juta kg.

Lalu siapa yang tak ingin jadi nomor satu? Pastilah semua kita sepakat menginginkannya. Tapi untuk itu tentu ada berbagai hal yang harus dipenuhi. Wapres Jusuf Kalla menyatakan tak perlu dulu jadi nomor satu tapi cukup nomor dua lebih dahulu. Kalau sudah nomor dua, menjadi nomor satu tentu tinggal satu langkah lagi. Tapi satu langkah tersebut jaraknya sangat lebar, karena Indonesia harus menggeser Vietnam yang produksi kopinya hampir 3 kali lipat dari Indonesia.

Maka, pilihan menjadi nomor dua adalah cita-cita yang lebih realistis. Hanya saja untuk menjadi nomor 2

itu banyak hal yang harus diperbaiki. Mengutip pemikiran yang diungkapkan Wapres, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian harus membantu petani di daerah penghasil kopi dalam hal subsidi modal, pupuk, penyuluhan, teknis peremajaan, dan teknis rehabilitasi lahan. Bantuan ini sangat diperlukan, karena jika ditelisik memang begitulah permasalahan yang dihadapi para petani kopi kita.

Saat ini perkebunan kopi di Indonesia mencakup total wilayah kira-kira 1,24 juta hektar, yakni 933 hektar perkebunan robusta dan 307 hektar perkebunan arabika. Lebih dari 90 persen dari total perkebunan tersebut dibudidayakan oleh para petani skala kecil yang sudah bisa kita bayangkan kondisinya, dengan lahan terbatas, penguasaan teknologi juga terbatas, modal kecil dan seterusnya. Sementara peluang pasar kopi semakin berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat yang makin bergaya dengan kebiasaan minum kopi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan dari 1,24 juta hektar lahan kopi 50 persen harus diremajakan.

Jika tidak maka produksinya akan mandek atau bahkan menurun. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberi subsidi pinjaman kepada petani melalui KUR [Kredit Usaha Rakyat], dengan harapan produksi kopi bisa lebih ditingkatkan. Di sisi lain Kementerian Perdagangan melalui Bappebti juga terus mengawal pelaksanaan Sistem Resi Gudang [SRG] yang salah satu komoditi unggulannya adalah kopi.

Promosi kopi juga secara gencar dilakukan baik untuk konsumen di dalam negeri maupun untuk ekspor. Tak

heran jika saat ini kita bisa menikmati kopi, mulai dari kopi tubruk, kopi sachet, *cappuccino* sampai *espresso*. Minum kopi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, di pinggir jalan sampai *cafe* berpendingin ruangan. Berbagai *event* untuk mempromosikan kopi Indonesia juga digelar di berbagai kesempatan pameran dagang di luar negeri. Bagaimana hasilnya? Jika ingin menjawab harapan Wapres Jusuf Kalla menjadi posisi ke-2 di dunia, tampaknya berat, bahkan sangat berat mencapainya. Menggeser tetangga kita Vietnam yang saat ini kekuatan

produksinya 3 kali lipat, jangan terlalu berharap banyak. Kita harus lebih realistis melihat diri kita sendiri. Konon, dulu Vietnam belajar berkebun kopi dari Indonesia. Tapi itu kan dahulu. Kita tak boleh selalu bangga dengan masa lalu, karena dalam sejarah sudah kerap terjadi seorang murid bisa mengalahkan sang guru. Tapi semangat untuk bisa menjadi lebih baik, dalam hal produksi dan ekspor kopi, tentu harus terus ditanamkan. Camkan, bahwa Indonesia bisa di posisi ke-2.

10 NEGARA PENGHASIL UTAMA KOPI DUNIA

- | | | | | | |
|---|---|---|----|---|--|
| 1 |  | Brazil
2,594 miliar kilogram
biji kopi | 6 |  | India
349,98 juta kilogram
biji kopi |
| 2 |  | Vietnam
1,65 miliar kilogram
biji kopi | 7 |  | Honduras
345 juta kilogram
biji kopi |
| 3 |  | Kolombia
810 juta kilogram
biji kopi | 8 |  | Uganda
285,3 juta kilogram
biji kopi |
| 4 |  | Indonesia
660 juta kilogram
biji kopi | 9 |  | Meksiko
234 juta kilogram
biji kopi |
| 5 |  | Etiopia
384 juta kilogram
biji kopi | 10 |  | Guatemala
204 juta kilogram
biji kopi |



Pengalaman Pertama Bisnis Forex Yang Terus Membekas

Shinta Sacha

Head of Commodity desk, Compliance
PT. Century Investment Futures

George Soros, seorang pebisnis global yang terkenal itu, pun pernah tiga kali terpuruk sampai uangnya habis. Tapi ia kembali bangkit dan terus bertahan sampai sekarang. Jadi, pasti ada sesuatu yang menarik dari bisnis ini

Tahun 2018 menjadi tahun ke-18 bagi Shinta Sacha berkecimpung di lingkungan bisnis perdagangan berjangka. Setiap harinya ia berurusan dengan naik turunnya index forex atau menerima keluhan dari nasabah. Ia pun turun tangan untuk melakukan *training* tentang bisnis forex kepada

yang memerlukan informasi tentang bisnis yang dikenal juga dengan SPA [Sistem Perdagangan Alternatif] ini. Sebelumnya Shinta, yang lulusan fakultas hukum Universitas Parahiyangan, Bandung, adalah pegawai sebuah bank swasta di Jakarta. Sekali waktu, seorang rekannya berhasil menarik minatnya untuk bekerja di perusahaan pialang berjangka. Awalnya ia hanya bermaksud bekerja di belakang meja untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan legal. Namun begitu masuk, ternyata Shinta malah disuruh mencari nasabah jika ingin mendapat gaji dan komisi.

Seorang rekannya ketika itu memberi informasi bahwa bisnis forex itu *return of investment*-nya bagus, uang tidak hilang dan juga bebas pajak. Termakan bujuk rayu menggoda itu, maka Shinta pun mencoba

menanamkan investasinya. Tak hanya itu, lebih jauh ia pun diminta untuk menggaet nasabah lain, seperti sistem *member get member*, agar menaruh uangnya di bisnis ini. Ia pun mengajak paman dan tantenya untuk ikut serta dengan harapan dapat memperoleh *return* yang tinggi. "Apa yang terjadi kemudian? Uang saya pribadi dan uang saudara saya amblas, hanya dalam waktu satu minggu," ujar Shinta mengenang pengalaman pertamanya di bisnis ini. Bayangkan uang pribadinya yang jumlahnya bisa dibeli sebuah apartemen ketika itu lenyap seketika, sementara uang saudaranya juga ikut menguap. "Siapa yang tidak sakit? Saya kemudian merasa "dendam" dan mencoba menyelami seluk beluk bisnis forex. Saya baca sebuah buku yang menceritakan George Soros, seorang pebisnis global yang terkenal itu, pun

pernah tiga kali terpuruk sampai uangnya habis. Tapi ia kembali bangkit dan terus bertahan sampai sekarang. Jadi, pasti ada sesuatu yang menarik dari bisnis ini," kata Shinta.

Sebagai karyawan di perusahaan perdagangan berjangka, Shinta kemudian berusaha mendalami bisnis ini. Tiga kali pindah kerja di perusahaan berjangka, ia mengaku banyak bertemu dengan *marketer* dan melihat bagaimana mereka bekerja. "Saya bertemu dengan mereka yang baik, yakni mereka yang bekerja sesuai dengan prosedur dengan menjelaskan produk bisnis forex dengan benar. Saya juga bertemu dengan mereka yang tidak baik, menjebak nasabah untuk *buy or sell* tanpa pertimbangan matang, yang penting mereka dapat komisi dan keuntungan pribadi. Dari situ saya jadi mengerti tentang bisnis ini," kata wanita yang suka memelihara kucing ini.

Bergaul secara langsung dengan para pelaku bisnis SPA atau forex membuat Shinta melihat dua sisi, yakni perilaku yang baik dan perilaku yang tidak perlu ditiru. Marketing yang baik, menurutnya, adalah mereka yang menjelaskan prosedur, regulasi dan juga risiko yang mungkin dihadapi jika masuk ke bisnis ini. Sementara mereka yang kurang baik adalah marketing yang hanya mengejar komisi tanpa menjelaskan risiko-risiko yang bakal dihadapi.

Dulu ketika ia masih bekerja di bank, Shinta menilai peraturan di bank sangat *rigid* dan aspek KYC [Know Your Customer] diterapkan dengan baik. Sementara di forex ketika itu, tahun 2001, peraturannya masih longgar dan pengetahuan nasabah belum sebaik saat ini. "Sekarang peraturan dari Bappebti sudah jauh lebih ketat, sehingga bisnis ini lebih aman dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya".

Walau pernah "sakit hati" nyemplung di bisnis berjangka, namun Shinta mengaku masih tetap akan menekuni

bisnis ini. Untuk itu ia selalu semangat untuk berbagi informasi dengan calon nasabah yang ingin terjun ke bidang ini dengan menjelaskan berbagai hal terkait dengan bisnis forex secara obyektif. "Kalau sesudah kita jelaskan mereka siap, silakan masuk dan bertransaksi. Tapi kalau tidak siap, jangan teruskan," ungkapnya. Sistem Perdagangan Alternatif [SPA] atau forex ini, tambah Shinta, selain memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang produk dan juga informasi pendukung lainnya, antara lain situasi ekonomi dan politik global yang mempengaruhi pergerakan index forex, juga dipengaruhi sikap mental nasabah. "Seringkali ketika kita menang dalam transaksi, kita menjadi jumawa. Semestinya kita *stop* transaksi pada titik tertentu. Tapi karena sifat *greedy* manusia, kita terus pasang, pasang, kemudian pasang lagi. Sampai kemudian ternyata harganya anjlok dan margin yang sudah kita miliki habis dalam sekejap," kata wanita yang tingginya sekitar 170 cm ini. Jadi, disinilah kunci dari bisnis ini, yakni pengetahuan yang cukup ditambah dengan pengendalian emosi yang baik.

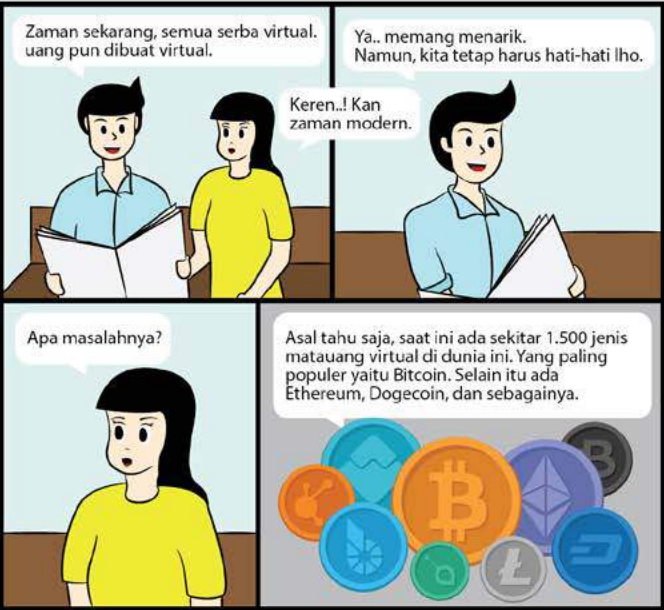
Shinta sudah bekerja di PT Century Investment Futures sudah 14 tahun. Sebelumnya ia juga berkariir di tiga perusahaan sejenis. Boleh dibilang sepanjang kariernya Shinta berada di lingkungan perdagangan berjangka. Sekarang ia dipercaya juga untuk menangani *desk commodity* untuk menangani transaksi multilateral, bidang yang sedang digenjot oleh Bappebti, karena transaksi multi dinilai lebih memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Namun diakui oleh Shinta menangani perdagangan multilateral lebih berat ketimbang menjalankan SPA, karena pergerakan harga di multilateral tidak seaktif perdagangan SPA.

Namun demikian ia optimis melihat perkembangan sekarang yang menunjukkan kecenderungan yang lebih baik, dimana bursa juga tampak



lebih fokus. "Kita ingin aspek spekulasi berjalan, tapi juga transaksi primernya, pasar fisiknya, juga berjalan. Sekarang kondisinya sudah lebih baik, walaupun baru terbatas pada komoditi emas. Saya berharap SPA dan multilateral bisa berjalan bersama-sama, maju bersama-sama," ujar wanita yang sekarang ditugaskan untuk fokus pada pengembangan transaksi multilateral ini.

Menyinggung soal persaingan yang semakin ketat, tidak hanya di antara perusahaan sejenis di dalam negeri, tapi juga dengan perusahaan yang tergolong ilegal dari luar negeri, Shinta menyatakan tidak terlalu khawatir. Kata Shinta, "Alhamdulillah, perusahaan kami menerapkan aturan yang ketat dengan memberikan informasi yang benar. Dengan aturan yang ketat itu, klien kami malah merasa nyaman. Karena itu janganlah takut untuk mengungkapkan bahwa transaksi ini berisiko. Jangan mengiming-iming. Bos saya bilang, dia lebih suka jumlah nasabah sedikit tapi tidak ada *complaint* daripada banyak nasabah tapi tidak bisa tidur nyenyak karena banyak muncul *complaint*".



#KOMIKITA

Hati-Hati Dengan Mata Uang Virtual



Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi Bappebti Kementerian Perdagangan dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901. Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
*SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Toni (Subang) 0877-8756XXXX
Pertanyaan:
Saya seorang nasabah perdagangan berjangka. Saya belum lama ikut dalam bisnis jenis ini. Untuk berjaga-jaga saja, kalau misalnya saya mengalami masalah, kemana dan bagaimana saya mesti mengadu?
Toni, Subang

Jawab:
Pak Toni Yth, jika anda menemukan masalah dalam keikutsertaan anda di perdagangan berjangka, sebaiknya anda menyampaikan dahulu permasalahannya kepada Perusahaan Pialang yang bersangkutan. Upayakan untuk melakukan mediasi. Namun jika tidak terjadi kesepakatan silakan anda menyampaikannya ke Bursa Berjangka. Terakhir anda bisa juga menyampaikannya ke Bappebti. Pengaduan ke Bappebti sebaiknya disampaikan terlebih dahulu melalui aplikasi pengaduan nasabah secara online yang dikelola dan diawasi oleh Bappebti dengan melalui website Pengaduan Online, yaitu pengaduan.bappebti.go.id.

INDONESIA HEBAT TANPA PENCUCIAN UANG

Kesenjangan Ekonomi, Sulitnya Mencari Pekerjaan, Bisnis yang rentan, Tingginya Angka Kejahatan bagian Masalah Bangsa yang Harus Diatasi

Korupsi, Penggelapan Pajak, Penyalahgunaan Narkotika, Terorisme, Pencucian Uang, dan Kejahatan Ekonomi Lainnya Menghasilkan Dampak Buruk Bagi Negara Kita

Pelaku Kejahatan Tidak Berhenti pada saat Kejahatan dilakukan dan Hasil Kejahatan Berhasil Diperoleh. Pelaku Kejahatan Biasanya Juga Menyembunyikan atau menyamarkan uang / harta hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah. Perbuatan tersebut adalah **PENCUCIAN UANG**

Pelaku Pencucian Uang berniat untuk **menghindari penyelidikan aparat hukum**, meningkatkan keuntungan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan dengan aman

Dalam melakukan aksinya, pelaku pencucian uang akan menempatkan hasil kejahatan kedalam berbagai transaksi keuangan, memindahkan dan memperpanjang rangkaian transaksi dan pada akhirnya, setelah dirasa aman, pelaku akan mengambil kembali uang/harta itu untuk dinikmati.

PENCUCIAN UANG BERDAMPAK PADA:

Meningkatnya angka kriminalitas

Sektor swasta yang sah sulit berkembang

Integritas sistem keuangan terganggu

Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi

KALAU BERSIH KENAPA HARUS RISIH

Manfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG)



Mendapatkan harga lebih baik dengan tunda jual (komoditi) disimpan pada waktu harga rendah/panen raya dan dijual pada waktu harga menjadi lebih baik



Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan



Mendapatkan pembayaran dengan cara tepat dan mudah



Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi dan posisi tawar